Menjadi "Orang Indonesia"

Tonny D. Pariela

"Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia" adalah tema yang sangat tepat untuk digumuli dalam realitas kekinian Indonesia. Tema seperti ini mesti dipandang strategis dan penting dijadikan sebagai diskursus intelektual: tema itu tidak saja bersentuhan dengan masa depan bersama bangsa Indonesia, tapi juga menantang pengerahan energi pikir guna mencari dan menemukan formasi yang tepat dalam menempatkan dan mendialogkan berbagai perbedaan terutama di antara identitas asal di Indonesia dalam posisi yang setara.

Dari perspektif inilah saya berpendapat bahwa pandangan Buya Ahmad Safii Maarif patut diberi apresiasi. Ia telah berhasil menguak salah satu sisi penting dari realitas dalam konstelasi sosial dan politik nasional dewasa ini. Selain itu, ia juga telah membuka ruang percakapan yang inklusif bagi suatu kemungkinan yang saya sebut sebagai "menjadi orang Indonesia", sebuah pernyataan yang lebih bermakna sosiologis daripada politis.

Meskipun Buya menunjukkan pengetahuannya yang cukup luas dengan merujuk pada pengalaman historis sejumlah negara lain, saya yakin beliau sangat paham bahwa perkuatan identitas asal, termasuk yang berbasis agama, tidak berlangsung di dalam sebuah ruang yang

vakum-nilai. Dengan demikian, pertanyaan kritisnya adalah bagaimana politik identitas dengan "jubah" (meminjam istilah beliau) apa pun, terutama agama, memperoleh lahan yang subur di bumi pertiwi, khususnya pasca-reformasi politik 1998? Apakah mereka yang disebut anti-demokrasi, anti-pluralisme, dan bahkan anti-nasionalisme itu dengan serta merta mengadopsi ideologi banyak "anti" tersebut dan menerapkannya di Indonesia tanpa didukung iklim sosio-politis yang memungkinkan? Bagaimana dengan politik identitas yang berjubah lain, seperti suku, yang marak dipraktikkan merespons peluang politik otonomi daerah saat ini? Bukankah semuanya adalah tantangan (kalau bukan ancaman) bagi masa depan Indonesia yang berciri majemuk?

***

Jika perjalanan bangsa Indonesia direnungkan (paling tidak) sejak tahun 1928 hingga kini, tampaknya ada sejumlah catatan kritis yang harus dikemukakan sebab terkait dengan realitas maraknya politik identitas dewasa ini.

Pertama, pernyataan Sumpah Pemuda, tahun 1928, dapat dikatakan lebih bersifat politis daripada sosiologis. Artinya, hal itu terjadi lebih karena dorongan untuk mendeklarasikan suatu kebersamaan demi perjuangan kemerdekaan politik, dan kurang memberikan atensi terhadap—dan atau upaya yang sungguh bagi— proses konsolidasi realitas sosiologis yang tampak berbeda-beda di dalam struktur masyarakat. Dalam pandangan saya, di masa itu, pernyataan "Satu Bangsa, Satu Tanah Air, dan Satu Bahasa" tampak lebih dimaksudkan untuk menggalang dan memobilisasi sentimen politik dan energi sosial untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan dan kurang dimaksudkan sebagai upaya serius mengembangkan identitas kebangsaan yang baru—yakni identitas ke-Indonesia-an yang digagas, dan mestinya dapat dikembangkan serta dirawat secara sengaja.

Dalam kaitan ini, apa yang direkam oleh Furnivall tentang *plural society* dapat dijadikan rujukan penting yang menjelaskan kondisi sosial-politis dan ekonomi masyarakat Indonesia sampai dengan akhir tahun 1940-an. Dari hasil studinya, Furnivall memperoleh gambaran tentang *plural society,* dan kemudian memaknainya sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tak membaur, dalam satu unit politik; dan ciri politik yang dianggapnya paling menggelisahkan dalam realitas masyarakat demikian adalah tidak terlihatnya kehendak sosial umum di antara mereka (Hefner [ed.], 2007; Worsley, 1991).

Mengacu pada kerangka pikir Furnivall ini, dapat dikatakan bahwa deklarasi Sumpah Pemuda yang dimaksudkan di atas, hakikatnya hanya mencerminkan dorongan kuat untuk menempatkan realitas perbedaan ke dalam satu unit politik—Indonesia (aspek politis) guna dijadikan sebagai modal politik bagi perjuangan kemerdekaan, tetapi belum sempat diikuti dengan upaya lain untuk mengembangkan dan memperkuat modal dimaksud sebagai identitas ke-Indonesia-an (aspek sosiologis). Pengabaian aspek sosiologis di masa ini sesungguhnya bisa dipahami, tetapi pengabaian yang sama ternyata masih terus berlanjut baik di masa Orde Lama hingga Orde Baru. Dengan kata lain, sesudah kemerdekaan nasional pun kita belum sempat merumuskan suatu pola pengelolaan masyarakat majemuk yang adaptif dengan, dan atau fungsional terhadap, proses pembentukan identitas ke-Indonesia-an dalam *spirit* demokrasi yang berkeadilan sosial.

Kedua, pada era pasca-kemerdekaan, atau tepatnya di masa pemerintahan Orde Lama, politik aliran sedemikian maraknya dan ikut memberi kontribusi bagi instabilitas sosial politik sehingga berdampak pada deteriorasi ekonomi Indonesia. Di era ini, pluralisme primordial[1] tidak terfasilitasi dan berkembang dengan baik,

[1]Wujud pluralisme di mana loyalitas kultural dan emosional seseorang atau sekelompok orang terkait erat dengan sentimen identitas asal (Apter, 1987:293-295).

diindikasikan oleh munculnya kekuatan-kekuatan politik berbasis sentimen SARA. Kenyataan ini kemudian makin diperburuk dengan pertarungan ideologis di antara kekuatan-kekuatan nasionalisme, agama, dan komunisme. Pemimpin Besar revolusi, Bung Karno, memang telah mencoba mengelola situasi problematik demikian dan berharap bisa mensintesakan ketiga ideologi tersebut menjadi, katakanlah, salah satu karakter dasar Bangsa Indonesia. Tapi ternyata ia gagal, karena doktrin agama diyakini tidak dapat didialogkan dengan doktrin komunisme. Selain itu, ia tidak berhasil menyentuh dimensi-dimensi pluralitas bangsa sebagaimana tercermin dalam realitas identitas asal masing-masing kelompok sosial politik yang berbeda-beda.

Menguatnya *bonding social capital*,[2] dan tidak terbukanya ruang yang memadai bagi berkembangnya *bridging social capital*,[3] menyebabkan derajat kohesi sosial di antara kelompok-kelompok sosial politik yang berbeda-beda di dalam masyarakat Indonesia menjadi lemah, sehingga tidak memungkinkan terbentuknya identitas ke-Indonesia-an, dan memperburuk kondisi perekonomian bangsa. *Far Eastern Economic Review 1968 Yearbook,* mencatat kemunduran ekonomi berada pada tingkatnya yang paling buruk dalam tahun 1966, di mana inflasi mencapai 714%. Pengalaman di masa ini menunjukkan bahwa praktek "politik sebagai panglima", yang mengabaikan dimensi sosiologis masyarakat Indonesia, akan menjebak kita ke dalam pertarungan politik kekuasaan dan menelantarkan pluralitas masyarakat diam di dalam kantong-kantong sosial yang segregatif dan eksklusif.

---

[2]Modal sosial yang mengacu pada relasi di antara kelompok-kelompok yang relatif homogen dan memperkuat ikatan-ikatan sosial di dalam kelompok yang bersangkutan (Kearns, 2004: 7).

[3]Modal sosial yang merujuk pada relasi-relasi antar kelompok yang heterogen, dan memperkuat ikatan-ikatan sosial lintas kelompok-kelompok tersebut (Kearns, 2004: 7).

Ketiga, instabilitas sosial-politik dan deteriorasi ekonomi di masa Orde Lama menyebabkan pengaruh traumatik bagi pemerintahan Orde Baru. Pendekatan keamanan digunakan sebagai alat yang efektif untuk meminimalisasi berbagai potensi konflik akibat perbedaan, dengan mengedepankan uniformitas sebagai suatu "ideologi" yang dipandang bisa menjamin stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan demikian pun ternyata tidak memberi ruang bagi perkembangan pluralisme primordial ke tahap pluralisme liberal,[4] dan kemudian menuju ke tingkat pluralisme konsosiasional.[5] Sebaliknya, yang terjadi adalah gerakan penyeragaman nasional yang sangat melemahkan potensi modal sosial di dalam masyarakat. Peran hegemonik negara (baca: pemerintah) yang sedemikian kuat tidak saja menimbulkan ketergantungan dan tersubordinasinya *civil society* kepada negara, tetapi sekaligus mengurung energi sosial dalam bejana kekuasaan, sehingga masyarakat menjadi apa yang disebut Dahrendorf sebagai *"imperatively coordinated associations."* Untuk kedua kalinya, menurut saya, pluralitas masyarakat kembali diterlantarkan dengan sengaja.

Keempat, reformasi politik tahun 1998 menyebabkan berbagai saluran aspirasi politik menjadi terbuka, tetapi hal itu tidak disertai dengan kematangan kelompok-kelompok masyarakat untuk hidup berbeda. Ini kenyataan yang dapat dipahami, mengingat masyarakat berada dalam situasi hegemoni negara yang begitu kuat dan lama. Atas nama semangat demokrasi dan otonomi daerah, politik identitas tampak kembali memperoleh momentumnya untuk bangkit, tetapi tidak di tengah situasi di mana *bridging social capital* berada

[4]Pluralisme yang ditandai dengan berkurangnya peran kelompok-kelompok primordial, di mana tidak ada individu yang diidentifikasi sepenuhnya dengan afiliasi tertentu (Apter, 1987: 295-311).

[5]Pluralisme yang ditandai dengan transformasi primordialisme menjadi sarana-sarana demokrasi pluralis yang efektif (Apter, 1987: 311-316).

pada tingkat yang *solid* dan kuat. Sebaliknya, politik identitas semakin mengental justru di tengah rendahnya derajat *bridging social capital* (atau menguatnya *bonding social capital*)—atau berkembang di tengah kemacetan dialog antarperadaban baik pada tingkat nasional maupun lokal, suatu kondisi sosial-politik yang relatif mirip dengan di masa Orde Lama. Menyikapi situasi ini, pertanyaan kritisnya adalah, adakah kita masih ingin menelantarkan pluralitas masyarakat untuk ketiga kalinya?

Keempat kondisi di atas menjelaskan korelasi antara realitas kemajemukan di dalam masyarakat Indonesia dan stabilitas politik terutama pada aras nasional: bahwa penguatan identitas asal akibat pengabaiannya di masa lalu, atas nama kepentingan politik praktis dan pembangunan ekonomi *an sich,* ternyata hanya akan menciptakan *public domain* yang segregatif, potensial mengandung ketegangan hubungan-hubungan sosial di antara komponen masyarakat yang berbeda.

Dalam kerangka pemikiran inilah pandangan Buya Maarif, sebagai apresiasinya terhadap pemikiran inklusif almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur), yakni untuk mencari dan menemukan katup pengaman *(safety valve)* yang *appropriate* bagi banyak kelompok, dapat dipandang relevan untuk dijadikan basis bagi pengembangan pola manajemen masyarakat plural di Indonesia yang terproses secara *bottom-up.* Melalui pendekatan ini, diharapkan tumbuh dan berkembangnya mekanisme ketahanan diri *(self-defence mechanism)* yang *built-in* di dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan berkemampuan menyeleksi *input* provokatif yang mengancam integrasi sosial dan bahkan mungkin ancaman disintegrasi politik, sekaligus membuka pula ruang bagi proses pembentukan identitas ke-Indonesia-an yang diidealkan.

***

Andaikata para pemimpin nasional kita dewasa ini tidak hanya menghabiskan energi pikirnya untuk merumuskan pencapaian target-target ekonomi yang materialistik, tetapi mau mengimbanginya dengan upaya untuk memfasilitasi proses pematangan atau pendewasaan masyarakat dalam ruang realitas kemajemukan bangsa, maka negara diyakini akan mampu menyelenggarakan fungsinya dengan baik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Fukuyama (2005).[6] Sementara itu, di lain pihak, *bridging social capital* akan tumbuh menjadi kekuatan kohesif yang merajut kepelbagaian realitas sosial dalam satu ikatan kebangsaan secara sosiologis, menjadi Indonesia. Implikasinya ialah, kesejahteraan sosial ekonomi dapat diraih sebagaimana dipetakan oleh Woolcock dan Narayan (2000), di dalam tipologi hubungan antara peran negara di satu pihak dan derajat *bridging social capital* di dalam masyarakat di lain pihak.

Gagasan intinya ialah bagaimana memperkuat fungsi negara dan meningkatkan derajat *bridging social capital* secara bersamaan. Ini berarti, selain *good governance* harus dipraktikkan secara konsisten dan disiplin, maka perkembangan tahapan pluralisme di Indonesia pun mesti terfasilitasi dengan baik, agar basis-basis ikatan sentimen primordial bisa mengalami proses transformasi menjadi sarana-sarana demokrasi pluralis yang efektif mengawal keutuhan bangsa yang majemuk. Potensi untuk mengembangkan *common domain,* yang mengandung *shared values* untuk dijadikan sebagai representasi kolektif, sesungguhnya tersedia tetapi selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

Christine Drake (dalam Ju Lan, 2000) menyebutkan empat faktor yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk membangun *common domain,* yaitu (1) kesamaan sejarah dan politik berbangsa;

[6]Fukuyama mendiskusikan pentingnya memperkuat negara, bukan dari perspektif kekuasaan, tetapi dari aspek implementasi fungsi negara, sehingga dapat diperoleh kejelasan mana yang menjadi *domain* negara dan di mana *domain* privat.

(2) kesamaan atribut-atribut sosial budaya; (3) interaksi di antara komunitas-komunitas yang mempunyai beraneka ragam atribut sosial budaya; (4) saling ketergantungan dan kesetaraan ekonomi antar daerah. Ke dalam empat faktor itu, saya hendak menambahkan satu faktor lainnya, yaitu (5) kesadaran sosial, komitmen dan kemauan politik untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, Indonesia. Ini adalah nilai-nilai penting yang bisa dipedomani sebagai rujukan bersama untuk mendorong proses transformasi struktur dan kultur; membangun orientasi politis dan sosiologis baru di mana deteritorialisasi identitas asal menjadi teritorialisasi identitas kewilayahan—Indonesia—tidak harus menyangkal identitas asal itu sendiri yang hakekatnya memang berbeda-beda. Di sini, *cross-cutting identity* menjadi kata kunci untuk mendorong terwujudnya identitas ke-Indonesia-an tanpa menegasikan identitas kultural lokal.

Melalui pemikiran ini, saya ingin menegaskan pentingnya *social chemistry* dalam proses penunggal-ikaan di tengah realitas ke-*bhinneka*-an Indonesia. Dengan demikian, akan ada keseimbangan dalam orientasi nilai (lokal-nasional) dan keterikatan sentimen (lokal-nasional) secara berimbang di dalam berbagai ranah publik, sehingga soliditas, solidaritas, dan kerjasama antar identitas asal menjadi karakter dasar dan profil dari identitas ke-Indonesia-an yang diharapkan.

Saya beranggapan bahwa pemikiran cerdas Cak Nur dan Buya Syafii tentang Pancasila yang harus terbuka bagi penafsiran baru, dan agama yang seyogianya pula dapat membuka diri bagi sebuah proses tafsif ulang, adalah hal yang sangat hakiki untuk memfasilitasi terwujudnya nasionalisme kebangsaan Indonesia yang baru tanpa kehilangan akar kultural dan relijius setiap warganegara. Oleh karena itu, ke depan, nasionalisme kebangsaan sebaiknya tidak ditumbuhkan atas dasar kesadaran tentang kesatuan, tetapi nasionalisme yang berkembang berdasarkan kesadaran akan perbedaan dalam semangat persatuan; dan dengan demikian maka perbedaan itu sendiri akan memperoleh tempat yang layak dan terhormat. Mengacu pada pengalaman historis di masa lalu, menurut saya, hal ini hanya

mungkin terwujud bilamana proses politik terfasilitasi berbanding lurus dengan proses sosiologis.

***

Menjadi "orang Indonesia" sesungguhnya bukan sesuatu yang mustahil. Menjadi "orang Indonesia" dapat dibentuk melalui pengembangan apa yang saya sebut sebagai *plural social capital,* yaitu relasi-relasi sosial antarkelompok yang berbeda identitas asal di dalam suatu tingkatan wilayah/teritorial tertentu (nasional dan lokal), yang memperkuat ikatan-ikatan sosial sebagai satu identitas warga wilayah/teritorial dimaksud.

Gagasan ini mengandaikan terjadinya proses *social chemistry* yang mentransformasikan sumberdaya sosial yang berbeda-beda ke dalam semangat identitas baru yang mempersatukan, Indonesia. Dengan demikian, maka *ethnic nation* yang memperoleh momentum kebangkitannya melalui otonomi daerah, dapat diminimalisasi, sekaligus memperoleh peluang pula untuk mengalami transformasi menjadi *civic nation;* atau, solidaritas *in-group* keagamaan bisa diletakkan secara tepat dan proporsional di ranah publik yang majemuk. Itulah sebabnya, pendidikan multikultural menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai *input* dalam rangka *nation and character building.*

Proses deteritorialisasi identitas asal menjadi teritorialisasi identitas berbasis wilayah tertentu sesungguhnya bukan mimpi dalam menara gading yang tidak bisa diwujud-nyatakan. Misalnya, seperti saya tunjukkan dalam disertasi saya (2008), pengalaman proses-proses sosial yang asosiatif di dalam masyarakat Desa Wayame,[7]

[7]Sebuah desa pesisir yang terletak di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Desa ini ternyata tetap terpelihara damai di tengah konflik Maluku yang sementara berkecamuk.

sepanjang periode konflik Maluku berlangsung, memberi gambaran yang sangat jelas tentang peluang pembentukan identitas baru sebagai "orang Wayame", tanpa harus mengorbankan identitas asal masing-masing orang atau kelompok orang. Pengalaman itu juga memperlihatkan bahwa identitas baru tersebut sangat fungsional bagi upaya mengembangkan soliditas dan dapat memperkuat kohesi sosial di antara komponen-komponen warga masyarakat Wayame yang berbeda-beda sukubangsa dan agama, semata-mata sebagai respons kritis atau manifestasi konkrit dari *survival strategy* menghadapi ketidak-pastian situasi konflik Maluku pada saat itu.

Tantangannya memang adalah bagaimana pengalaman lokal di Desa Wayame itu, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang sama di daerah lainnya di Indonesia, dapat dikembangkan sebagai model konsolidasi masyarakat plural pada aras nasional. Bagi saya, jawaban atas tantangan ini bukan terletak pada soal bisa atau tidak bisa, tetapi pada ada tidaknya kemauan baik dan kemauan politik dari semua elemen masyarakat yang sering dan suka sekali mengaku sebagai anak bangsa.

***

Menjadi "orang Indonesia" adalah sebuah obsesi atau ikhtiar sosiologis yang harus terus-menerus diupayakan. Jika Pancasila telah disepakati sebagai *kalimatun sawa* atau representasi kolektif bagi Indonesia dulu, sekarang dan di masa depan, maka politik identitas akan menjadi bongkahan fosil yang tidak lagi "seksi" untuk dilirik oleh siapa pun dan di mana pun, lokal maupun nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dan kerja cerdas termasuk kerja kreatif disertai kesediaan untuk saling memberikan konsesi di antara elemen-elemen masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.

Kini memang saatnya bagi kita untuk tidak boleh lagi tertipu oleh proses-proses konsolidasi wawasan kebangsaan yang semu. Diper-

lukan transformasi struktur dan kultur yang dilakukan dengan sengaja, diikuti oleh perilaku para pemimpin—terutama elite politik —yang mampu menjaga jarak-kritis terhadap isu-isu sektarian, yang tidak memobilisasi sentimen primordial publik untuk kepentingan politik praktis yang sesaat, atau tidak menunggangi kekecewaan massa sekadar untuk mencapai tujuan-tujuan politik praktis tertentu. Di dalam kompetisi sosial, politik dan ekonomi dewasa ini, yang seringkali disertai dengan kekurangpercayaan diri yang tinggi di kalangan para pemimpin dan elit politik, sangat disadari bahwa tuntutan perilaku di atas menjadi tidak mudah dilaksanakan. Tapi, kalau tidak begitu, apakah memang ada pilihan lainnya?***